

Implementasi Kebijakan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di Sekolah

Sri Suhartiningsih¹, Cucu Atikah²

^{1,2}Pascasarjana Teknologi Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

e-mail: * srifathan683@gmail.com, cucuatikah@untirta.ac.id

Abstract / Abstrak

This study aims to analyze the implementation of educational policy in improving the quality of learning at SDN Kadingding, Serang Regency, Banten Province, Indonesia. The study employed a qualitative approach using a case study method. Data were collected through in-depth interviews with one principal, six teachers, and one school supervisor, supported by classroom observations and document analysis. The findings indicate that educational policy has been implemented through the application of the Merdeka Curriculum, academic supervision, teacher learning communities, and the development of instructional planning. However, several challenges remain, including limited digital facilities, variations in teachers' competencies in implementing differentiated instruction, and constraints in educational resources. Supporting factors include the commitment of school leadership, teachers' active participation, and support from the government and the local community. The implementation of educational policy has contributed to improving learning quality, as reflected in more student-centered instructional practices, increased teacher professionalism, stronger collaboration among teachers, and enhanced student engagement. The study concludes that effective policy implementation requires synergy among all stakeholders to ensure continuous improvement in learning quality.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pendidikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran di SDN Kadingding, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap satu kepala sekolah, enam guru, dan satu pengawas sekolah, serta didukung oleh observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan dilaksanakan melalui penerapan Kurikulum Merdeka, supervisi akademik, penguatan komunitas belajar guru, dan penyusunan perangkat pembelajaran. Meskipun demikian, implementasi masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan sarana digital, variasi kompetensi guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, serta keterbatasan sumber daya pendukung. Faktor pendukung implementasi meliputi komitmen kepala sekolah, keterlibatan aktif guru, serta dukungan pemerintah dan masyarakat. Implementasi kebijakan tersebut memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu pembelajaran yang ditandai dengan semakin berkembangnya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, meningkatnya profesionalisme guru, menguatnya kolaborasi antarguru, dan meningkatnya keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan agar peningkatan mutu pembelajaran dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Keywords:

Educational Policy; Policy Implementation; Learning Quality; Primary School; Case Study

Kebijakan Pendidikan; Implementasi Kebijakan; Mutu Pembelajaran; Sekolah Dasar; Studi Kasus

DOI:

<https://doi.org/10.53611/57ws5w04>

Article Info

Received: April 17, 2026

Accepted: August 16, 2026

Published: September 15, 2026

Copyright © 2026 The Author(s). Published by Suwaib Amiruddin Foundation, Indonesia.

This is an Open Access article under the CC BY 4.0 license

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan bangsa karena berperan strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, berpengetahuan, terampil, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di era globalisasi dan transformasi digital saat ini, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membentuk kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, serta karakter peserta didik agar mampu menghadapi tantangan abad ke-21. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.

Menurut Michael Fullan (2011), pendidikan merupakan agen perubahan (*agent of change*) yang memiliki peran strategis dalam mendorong transformasi sosial, ekonomi, dan budaya melalui proses pembelajaran yang berkualitas. Fullan menegaskan bahwa keberhasilan reformasi pendidikan tidak hanya bergantung pada penyusunan kebijakan yang baik, tetapi juga pada kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut secara konsisten dan berkelanjutan.

Senada dengan pendapat tersebut, Hargreaves dan Fullan (2012) menjelaskan bahwa sistem pendidikan yang berkualitas dibangun melalui profesionalisme guru, budaya kolaboratif, kepemimpinan sekolah yang efektif, serta komitmen bersama dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Dengan demikian, keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan yang dirumuskan, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam praktik pembelajaran sehari-hari di sekolah.

Dalam konteks pembangunan pendidikan di Indonesia, pemerintah terus melakukan berbagai pembaruan kebijakan sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Berbagai kebijakan seperti implementasi Kurikulum Merdeka,

transformasi digital pendidikan, penguatan kompetensi guru melalui Platform Merdeka Mengajar, penguatan Komunitas Belajar (Kombel), Program Sekolah Penggerak, serta pemanfaatan Rapor Pendidikan merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Kebijakan-kebijakan tersebut dirancang untuk menciptakan pembelajaran yang lebih berpusat pada peserta didik, meningkatkan kompetensi pendidik, memperkuat budaya refleksi, serta membangun ekosistem pendidikan yang adaptif terhadap perubahan zaman.

James E. Anderson (2011) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang dirancang secara sadar oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam menyelesaikan berbagai permasalahan publik. Dalam bidang pendidikan, kebijakan berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh satuan pendidikan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran yang efektif, efisien, dan berkualitas. Kebijakan pendidikan menjadi instrumen penting dalam mengarahkan berbagai program peningkatan mutu, mulai dari pengembangan kurikulum, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, penyediaan sarana dan prasarana, hingga sistem evaluasi pendidikan. Oleh karena itu, keberhasilan suatu kebijakan pendidikan sangat dipengaruhi oleh proses implementasinya di tingkat sekolah sebagai pelaksana utama kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan. George C. Edwards III (2014) mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan sejauh mana kebijakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Komunikasi yang efektif memastikan bahwa seluruh pelaksana memahami isi kebijakan dengan benar, sementara ketersediaan sumber daya yang memadai memungkinkan pelaksanaan kebijakan berlangsung secara optimal. Selain itu, sikap positif para pelaksana serta struktur organisasi yang mendukung menjadi faktor penting dalam mewujudkan implementasi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

Mutu pembelajaran merupakan salah

satu indikator utama dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di suatu satuan pendidikan. Pembelajaran yang bermutu tidak hanya diukur dari capaian hasil belajar peserta didik, tetapi juga dari kualitas proses pembelajaran yang berlangsung di kelas. Proses pembelajaran yang berkualitas ditandai dengan keterlibatan aktif peserta didik, penggunaan strategi pembelajaran yang inovatif, pemanfaatan teknologi pendidikan, asesmen yang berorientasi pada peningkatan kompetensi, serta kemampuan guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Menurut Slavin (2015), mutu pembelajaran dipengaruhi oleh efektivitas strategi pembelajaran, kemampuan guru dalam mengelola kelas, serta tingkat partisipasi peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Sementara itu, Hattie (2012) melalui konsep *Visible Learning* menjelaskan bahwa kualitas guru merupakan faktor yang memiliki pengaruh paling besar terhadap keberhasilan belajar peserta didik. Oleh karena itu, implementasi kebijakan pendidikan harus mampu memperkuat kapasitas guru sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan pembelajaran.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia terus melakukan transformasi pendidikan melalui berbagai kebijakan strategis. Salah satu kebijakan yang menjadi fokus adalah implementasi Kurikulum Merdeka sebagai bagian dari transformasi pendidikan nasional. Kurikulum Merdeka menempatkan peserta didik sebagai subjek pembelajaran melalui pendekatan yang lebih fleksibel, kontekstual, dan berorientasi pada pengembangan kompetensi. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan berbagai program pendukung seperti Platform Merdeka Mengajar, Komunitas Belajar (Kombel), Program Sekolah Penggerak, digitalisasi sekolah, serta pemanfaatan Rapor Pendidikan sebagai dasar penyusunan program peningkatan mutu di tingkat satuan pendidikan.

Seluruh kebijakan tersebut bertujuan menciptakan ekosistem pendidikan yang mampu menjawab tantangan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

Meskipun berbagai kebijakan telah dilaksanakan, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Perbedaan karakteristik sekolah, keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana,

serta kesiapan organisasi menyebabkan keberhasilan implementasi kebijakan tidak selalu berjalan secara optimal. Edwards III (2014) menyatakan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh efektivitas komunikasi antar pelaksana, kecukupan sumber daya, komitmen pelaksana kebijakan, serta struktur birokrasi yang mendukung. Apabila salah satu komponen tersebut belum berjalan secara optimal, maka tujuan kebijakan akan sulit tercapai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan berbagai aktor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, hingga masyarakat.

Kondisi tersebut juga tercermin dalam hasil Rapor Pendidikan Indonesia Tahun 2025, yang menunjukkan bahwa masih terdapat satuan pendidikan dengan capaian indikator kualitas pembelajaran yang belum memenuhi target. Beberapa indikator yang masih memerlukan perhatian antara lain kualitas proses pembelajaran, kompetensi literasi dan numerasi peserta didik, iklim keamanan sekolah, kepemimpinan pembelajaran, serta kompetensi guru dalam menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.

Data tersebut menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan pendidikan belum secara otomatis mampu meningkatkan mutu pembelajaran apabila implementasinya belum berjalan secara efektif di tingkat sekolah. Oleh karena itu, sekolah perlu memanfaatkan hasil Rapor Pendidikan sebagai dasar dalam menyusun program peningkatan mutu yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing satuan pendidikan.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan mutu pembelajaran. Penelitian yang dilakukan oleh Fullan (2011) menunjukkan bahwa perubahan pendidikan akan berhasil apabila didukung oleh kepemimpinan yang kuat, budaya kolaboratif, serta komitmen seluruh warga sekolah dalam melaksanakan perubahan. Penelitian Hargreaves dan Fullan (2012) juga menjelaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dicapai hanya melalui perubahan kurikulum, tetapi harus diikuti dengan penguatan kapasitas profesional guru

melalui kolaborasi dan pembelajaran berkelanjutan.

Sementara itu, Darling-Hammond (2017) menegaskan bahwa kualitas guru merupakan faktor yang paling menentukan keberhasilan reformasi pendidikan karena guru menjadi pelaksana utama berbagai kebijakan pembelajaran di kelas.

Di Indonesia, sejumlah penelitian juga menunjukkan hasil yang sejalan. Penelitian mengenai implementasi Kurikulum Merdeka menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan kurikulum dipengaruhi oleh kesiapan guru, kepemimpinan kepala sekolah, dukungan sarana pembelajaran, budaya kolaborasi antarpendidik, serta pendampingan yang berkelanjutan.

Penelitian lain mengenai pemanfaatan Rapor Pendidikan mengungkapkan bahwa sekolah yang menggunakan data rapor sebagai dasar penyusunan program peningkatan mutu cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melakukan perencanaan berbasis data dibandingkan sekolah yang belum memanfaatkannya secara optimal. Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan memerlukan dukungan berbagai aspek agar mampu menghasilkan perubahan nyata terhadap mutu pembelajaran.

Namun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada implementasi kebijakan dari aspek administratif, implementasi kurikulum, atau evaluasi program tertentu. Penelitian yang mengkaji secara komprehensif hubungan antara implementasi kebijakan pendidikan dengan peningkatan mutu pembelajaran melalui perspektif komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi di tingkat sekolah dasar masih relatif terbatas.

Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya ruang penelitian yang perlu dikembangkan untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai bagaimana implementasi kebijakan pendidikan benar-benar memengaruhi kualitas pembelajaran di sekolah.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji implementasi kebijakan pendidikan, masih terdapat kesenjangan (*research gap*) yang perlu mendapat perhatian. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada evaluasi implementasi kurikulum, efektivitas program pemerintah,

atau pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan secara umum. Penelitian-penelitian tersebut umumnya mengkaji implementasi kebijakan secara parsial sehingga belum memberikan gambaran yang utuh mengenai keterkaitan antara implementasi kebijakan pendidikan dengan peningkatan mutu pembelajaran di tingkat satuan pendidikan. Selain itu, sebagian penelitian masih berfokus pada aspek administratif, seperti penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan supervisi, atau pemenuhan standar nasional pendidikan, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan kualitas proses pembelajaran yang berlangsung di kelas.

Di sisi lain, perkembangan kebijakan pendidikan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya perubahan paradigma yang cukup signifikan. Transformasi pendidikan melalui implementasi Kurikulum Merdeka, pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar, penguatan Komunitas Belajar (Kombel), digitalisasi pembelajaran, serta penggunaan Rapor Pendidikan sebagai dasar perencanaan berbasis data menuntut sekolah untuk mampu mengimplementasikan kebijakan secara lebih adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan tidak lagi hanya diukur dari tingkat kepatuhan sekolah terhadap regulasi, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menghasilkan perubahan nyata terhadap proses dan hasil pembelajaran peserta didik.

Dalam praktiknya, setiap sekolah memiliki karakteristik yang berbeda sehingga implementasi kebijakan pendidikan tidak selalu menghasilkan dampak yang sama. Perbedaan kepemimpinan kepala sekolah, kompetensi guru, budaya organisasi, dukungan sarana dan prasarana, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta keterlibatan orang tua menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu menggambarkan implementasi kebijakan pendidikan secara kontekstual sesuai dengan kondisi nyata di sekolah. Pendekatan tersebut penting karena memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan implementasi kebijakan dalam meningkatkan mutu pembelajaran.

Penelitian ini dilaksanakan di SDN

Kadingding Kabupaten Serang sebagai salah satu sekolah dasar yang terus berupaya meningkatkan mutu pembelajaran melalui implementasi berbagai kebijakan pendidikan. Sekolah telah melaksanakan berbagai program peningkatan mutu, antara lain implementasi Kurikulum Merdeka, penguatan komunitas belajar guru, supervisi akademik, pemanfaatan teknologi pembelajaran, serta penyusunan program sekolah berdasarkan hasil Rapor Pendidikan. Meskipun demikian, sebagaimana sekolah dasar pada umumnya, pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sarana pendukung, variasi kompetensi guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, serta perlunya penguatan budaya kolaboratif di lingkungan sekolah. Kondisi tersebut menjadikan SDN Kadingding sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji implementasi kebijakan pendidikan dalam hubungannya dengan peningkatan mutu pembelajaran.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis implementasi kebijakan pendidikan yang tidak hanya mengkaji proses pelaksanaan kebijakan, tetapi juga menghubungkannya secara langsung dengan peningkatan mutu pembelajaran melalui empat dimensi implementasi kebijakan menurut Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan hasil implementasi kebijakan dengan indikator mutu pembelajaran yang meliputi kualitas proses pembelajaran, profesionalisme guru, keterlibatan peserta didik, pemanfaatan teknologi pembelajaran, serta hasil belajar peserta didik.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara implementasi kebijakan pendidikan dan mutu pembelajaran pada tingkat sekolah dasar.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai implementasi kebijakan pendidikan, khususnya dalam konteks peningkatan mutu pembelajaran di sekolah dasar. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas penerapan teori implementasi kebijakan publik dalam bidang pendidikan sehingga memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi pendidikan dan manajemen pendidikan. Dari

sisi praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemerintah, dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, serta pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan strategi implementasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi sekolah dalam menyusun program peningkatan mutu berbasis data dan kebutuhan nyata di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian, yaitu: (1) bagaimana implementasi kebijakan pendidikan dilaksanakan di sekolah; (2) faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan pendidikan; dan (3) bagaimana implementasi kebijakan pendidikan berkontribusi terhadap peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi dasar dalam proses pengumpulan dan analisis data sehingga hasil penelitian mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan pendidikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan, serta mendeskripsikan kontribusi implementasi kebijakan terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pengambil kebijakan dan satuan pendidikan dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan pendidikan sehingga mampu meningkatkan mutu pembelajaran secara berkelanjutan serta mendukung terwujudnya pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis implementasi kebijakan pendidikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman secara mendalam mengenai fenomena implementasi kebijakan pendidikan berdasarkan pengalaman, persepsi, dan interpretasi para informan yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan. Penelitian kualitatif tidak berorientasi pada

pengujian hipotesis, melainkan bertujuan memahami makna suatu fenomena secara komprehensif sesuai dengan konteks sosial yang melatarbelakanginya.

Creswell (2014) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu permasalahan sosial maupun kemanusiaan melalui proses pengumpulan data secara alamiah dan analisis yang bersifat induktif.

Metode studi kasus dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengkajian secara mendalam terhadap implementasi kebijakan pendidikan pada satu satuan pendidikan, yaitu SDN Kadingding Kabupaten Serang. Yin (2018) menyatakan bahwa studi kasus merupakan strategi penelitian yang digunakan untuk memahami suatu fenomena kontemporer secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteksnya tidak tampak secara jelas. Melalui pendekatan studi kasus, peneliti dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai proses implementasi kebijakan pendidikan, faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya, serta dampaknya terhadap peningkatan mutu pembelajaran.

Penelitian dilaksanakan di SDN Kadingding, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, pada periode Januari hingga Maret 2026. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa sekolah tersebut telah melaksanakan berbagai kebijakan pendidikan, seperti implementasi Kurikulum Merdeka, penguatan Komunitas Belajar (Kombel), supervisi akademik, pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar, serta penyusunan program peningkatan mutu berdasarkan hasil Rapor Pendidikan. Selain itu, sekolah secara aktif melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas pembelajaran melalui pengembangan kompetensi guru, penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta penguatan budaya kolaboratif di lingkungan sekolah. Kondisi tersebut menjadikan SDN Kadingding sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji implementasi kebijakan pendidikan dalam konteks peningkatan mutu pembelajaran.

Subjek penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Sugiyono (2017) menjelaskan

bahwa purposive sampling digunakan apabila peneliti membutuhkan informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung terhadap fenomena yang sedang diteliti. Informan dalam penelitian ini terdiri atas satu kepala sekolah, enam guru kelas, dan satu pengawas sekolah. Kepala sekolah dipilih karena berperan sebagai pemimpin dalam implementasi kebijakan pendidikan di sekolah. Guru dipilih karena merupakan pelaksana utama kebijakan pendidikan dalam proses pembelajaran, sedangkan pengawas sekolah dipilih untuk memperoleh informasi mengenai proses pembinaan, supervisi, serta evaluasi implementasi kebijakan pendidikan di tingkat sekolah.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi sehingga diperoleh informasi yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan pendidikan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun berdasarkan fokus penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi secara lebih mendalam mengenai pengalaman, persepsi, hambatan, dan strategi yang dilakukan informan dalam melaksanakan kebijakan pendidikan.

Observasi dilakukan secara langsung terhadap proses pembelajaran, pelaksanaan supervisi akademik, kegiatan Komunitas Belajar, serta aktivitas lain yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pendidikan di sekolah. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui telaah terhadap berbagai dokumen, seperti visi dan misi sekolah, dokumen Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP), program kerja sekolah, hasil Rapor Pendidikan, perangkat pembelajaran, laporan supervisi akademik, notulen rapat, foto kegiatan, serta dokumen lain yang relevan dengan fokus penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tahap reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, mengelompokkan, menyederhanakan, dan memfokuskan data sesuai dengan tujuan penelitian. Tahap penyajian data dilakukan melalui penyusunan data dalam bentuk uraian naratif, matriks, maupun tabel sehingga

memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi pola, hubungan, dan kecenderungan yang muncul dari hasil penelitian. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap melalui proses interpretasi terhadap data yang telah dianalisis serta diverifikasi secara terus-menerus selama penelitian berlangsung untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan benar-benar didukung oleh data empiris.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah sehingga diperoleh data yang konsisten dan saling menguatkan. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi guna meningkatkan kredibilitas temuan penelitian. Selain triangulasi, peneliti juga menerapkan member checking, yaitu mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada informan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh sesuai dengan maksud yang disampaikan. Peneliti juga menjaga dependabilitas dan konfirmabilitas melalui pencatatan proses penelitian secara sistematis sehingga seluruh tahapan penelitian dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Melalui pendekatan, metode, teknik pengumpulan data, serta prosedur analisis yang sistematis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan pendidikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran di SDN Kadingding. Hasil penelitian diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian implementasi kebijakan pendidikan, tetapi juga menjadi bahan masukan bagi kepala sekolah, guru, pengawas, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan strategi peningkatan mutu pembelajaran yang lebih efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran

Kebijakan pendidikan merupakan instrumen strategis yang digunakan

pemerintah untuk mengarahkan penyelenggaraan pendidikan agar mampu menghasilkan layanan pembelajaran yang berkualitas. Kebijakan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman administratif, tetapi juga menjadi dasar dalam pengembangan budaya belajar, peningkatan profesionalisme guru, penguatan kepemimpinan sekolah, serta penciptaan lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didik. Dalam konteks pendidikan dasar, implementasi kebijakan diarahkan untuk memastikan setiap peserta didik memperoleh layanan pendidikan yang bermutu melalui proses pembelajaran yang efektif, inklusif, dan berpusat pada peserta didik.

Berdasarkan temuan penelitian, implementasi kebijakan pendidikan di sekolah telah diwujudkan melalui berbagai program yang mendukung peningkatan mutu pembelajaran. Program tersebut meliputi implementasi Kurikulum Merdeka, penyusunan perangkat ajar yang mengacu pada capaian pembelajaran, pelaksanaan supervisi akademik secara berkala, penguatan komunitas belajar guru, serta pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Berbagai program tersebut menunjukkan bahwa sekolah telah berupaya menerjemahkan kebijakan pemerintah menjadi praktik nyata yang mendukung peningkatan kualitas pembelajaran di kelas.

Pelaksanaan Kurikulum Merdeka memberikan ruang yang lebih luas bagi guru untuk merancang pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik. Fleksibilitas kurikulum memungkinkan guru memilih strategi, media, dan asesmen yang lebih kontekstual sehingga proses pembelajaran menjadi lebih bermakna. Selain itu, penyusunan perangkat ajar secara kolaboratif melalui komunitas belajar mendorong guru saling berbagi pengalaman, mendiskusikan berbagai permasalahan pembelajaran, serta menyusun solusi bersama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi, tetapi juga pada peningkatan kualitas praktik pembelajaran.

Temuan tersebut memperkuat pandangan Hattie (2012) yang menyatakan bahwa kualitas pembelajaran sangat dipengaruhi oleh efektivitas praktik mengajar, kemampuan guru memberikan umpan balik, serta keterlibatan aktif peserta didik dalam proses belajar. Menurut Hattie, kebijakan pendidikan akan memberikan dampak nyata

apabila mampu meningkatkan kualitas interaksi antara guru dan peserta didik di dalam kelas. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya diukur dari terlaksananya suatu program, tetapi juga dari perubahan kualitas pembelajaran yang dialami peserta didik.

Pendapat tersebut juga sejalan dengan Darling-Hammond (2017) yang menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan sangat bergantung pada investasi terhadap kompetensi guru. Guru yang memperoleh kesempatan mengikuti pelatihan, refleksi pembelajaran, dan kolaborasi profesional akan lebih mampu menerapkan strategi pembelajaran yang inovatif serta memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang beragam. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan perlu diimplementasikan melalui program-program yang secara langsung memperkuat kapasitas profesional guru.

Selain meningkatkan kompetensi guru, implementasi kebijakan pendidikan juga berkontribusi terhadap terbentuknya budaya sekolah yang berorientasi pada peningkatan mutu. Budaya tersebut tercermin melalui adanya perencanaan pembelajaran yang lebih sistematis, pelaksanaan supervisi akademik sebagai sarana pembinaan guru, evaluasi pembelajaran secara berkelanjutan, serta pemanfaatan data Rapor Pendidikan sebagai dasar penyusunan program peningkatan mutu sekolah. Pendekatan berbasis data tersebut memungkinkan sekolah melakukan identifikasi terhadap berbagai aspek yang masih memerlukan perbaikan sehingga program peningkatan mutu dapat disusun secara lebih tepat sasaran.

Dengan demikian, implementasi kebijakan pendidikan tidak dapat dipahami sebagai pelaksanaan regulasi semata, tetapi merupakan proses perubahan organisasi yang memerlukan komitmen seluruh warga sekolah. Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan sekolah menerjemahkan kebijakan menjadi program yang relevan dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi satuan pendidikan.

2. Implementasi Kebijakan Pendidikan

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan yang dirancang dengan baik tidak akan memberikan hasil optimal apabila tidak didukung oleh proses implementasi yang efektif. Dalam penelitian ini, implementasi kebijakan pendidikan

dianalisis menggunakan perspektif George C. Edwards III yang menekankan empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

Dari aspek komunikasi, sekolah telah berupaya menyosialisasikan berbagai kebijakan pendidikan kepada seluruh guru melalui rapat dinas, kegiatan komunitas belajar, workshop internal, dan supervisi akademik. Komunikasi yang dilakukan secara rutin membantu guru memahami arah kebijakan serta perubahan yang harus dilakukan dalam proses pembelajaran. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan berupa perbedaan tingkat pemahaman guru terhadap substansi kebijakan sehingga diperlukan pendampingan secara berkelanjutan.

Dari aspek sumber daya, sekolah memiliki tenaga pendidik yang berkomitmen melaksanakan kebijakan pendidikan, namun masih menghadapi keterbatasan pada aspek sarana digital dan fasilitas pembelajaran. Ketersediaan perangkat teknologi yang belum merata menyebabkan pemanfaatan media digital dalam pembelajaran belum optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, tetapi juga memerlukan dukungan sumber daya fisik yang memadai.

Aspek disposisi pelaksana menunjukkan adanya komitmen positif dari kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan kebijakan pendidikan. Komitmen tersebut tercermin melalui kesediaan mengikuti pelatihan, menyusun perangkat ajar, melaksanakan refleksi pembelajaran, serta berpartisipasi aktif dalam komunitas belajar. Sikap positif pelaksana menjadi modal penting dalam menciptakan perubahan budaya kerja menuju pembelajaran yang lebih berkualitas.

Sementara itu, dari aspek struktur birokrasi, sekolah telah memiliki pembagian tugas yang jelas melalui tim pengembang sekolah, koordinator kurikulum, serta pelaksanaan supervisi akademik secara berkala. Struktur organisasi yang jelas memudahkan koordinasi pelaksanaan berbagai program sehingga implementasi kebijakan dapat berlangsung lebih sistematis.

Hasil tersebut sejalan dengan teori Edwards III (2014) yang menyatakan bahwa komunikasi yang efektif, sumber daya yang memadai, disposisi pelaksana yang positif, dan struktur birokrasi yang jelas merupakan faktor utama keberhasilan implementasi

kebijakan. Keempat faktor tersebut saling berkaitan sehingga kelemahan pada salah satu aspek dapat memengaruhi keberhasilan implementasi secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan sekolah dalam menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam berbagai program dan praktik pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. Di SDN Kadingding, implementasi kebijakan pendidikan telah diwujudkan melalui berbagai upaya, antara lain penerapan Kurikulum Merdeka, penyusunan perangkat ajar yang mengacu pada capaian pembelajaran, pelaksanaan supervisi akademik secara berkelanjutan, penguatan komunitas belajar guru, serta peningkatan kompetensi pendidik melalui berbagai kegiatan pengembangan profesional. Berbagai program tersebut menunjukkan bahwa sekolah telah berupaya mengimplementasikan kebijakan pendidikan secara sistematis sebagai bagian dari strategi peningkatan mutu pembelajaran.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran. Dampak tersebut terlihat dari semakin berkembangnya penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, meningkatnya kolaborasi antarguru dalam menyusun dan mengevaluasi perangkat pembelajaran, serta semakin luasnya pemanfaatan media dan teknologi pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar.

Selain itu, pelaksanaan supervisi akademik dan komunitas belajar memberikan ruang bagi guru untuk melakukan refleksi, berbagi praktik baik, serta meningkatkan kompetensi profesional secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan aspek administratif, tetapi juga mendorong perubahan budaya kerja yang lebih kolaboratif, inovatif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan pembelajaran.

Temuan penelitian ini memperkuat teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III, yaitu bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat komponen tersebut saling berkaitan dalam menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan di tingkat sekolah. Komunikasi yang baik membantu guru memahami arah kebijakan secara tepat, sedangkan ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sarana pendukung, menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan program sekolah.

Di samping itu, komitmen kepala sekolah dan guru sebagai pelaksana kebijakan serta koordinasi organisasi yang berjalan dengan baik turut memperkuat keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa hambatan yang masih ditemui antara lain keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran, belum meratanya kompetensi guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, serta perlunya peningkatan literasi digital untuk mendukung transformasi pembelajaran. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan mutu pembelajaran merupakan proses yang berkelanjutan dan memerlukan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan.

Oleh karena itu, penguatan kapasitas guru melalui pelatihan yang berkesinambungan, penyediaan sarana pembelajaran yang memadai, serta optimalisasi pemanfaatan data Rapor Pendidikan sebagai dasar perencanaan peningkatan mutu perlu terus dilakukan agar implementasi kebijakan pendidikan memberikan hasil yang semakin optimal.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan pendidikan merupakan faktor strategis dalam meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Keberhasilan implementasi kebijakan memerlukan sinergi antara pemerintah, dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat sebagai satu ekosistem pendidikan yang saling mendukung. Kolaborasi tersebut akan memperkuat keberhasilan berbagai program peningkatan mutu pendidikan sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang adaptif,

inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik.

Dengan demikian, implementasi kebijakan pendidikan tidak hanya menjadi instrumen administratif dalam penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga menjadi motor penggerak perubahan yang mampu meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan serta mendukung terwujudnya tujuan pendidikan nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan pendidikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi berbagai pihak dalam mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pendidikan.

Pertama, bagi pemerintah dan dinas pendidikan, diperlukan penguatan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada penyusunan regulasi, tetapi juga pada pendampingan implementasi di tingkat satuan pendidikan. Pendampingan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan program pembinaan, supervisi akademik, pelatihan berkelanjutan, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai agar sekolah memiliki kemampuan yang optimal dalam melaksanakan berbagai kebijakan pendidikan.

Kedua, bagi kepala sekolah, diharapkan dapat terus memperkuat kepemimpinan pembelajaran (*instructional leadership*) dengan mendorong budaya kolaborasi, refleksi, dan inovasi di lingkungan sekolah. Kepala sekolah juga perlu memanfaatkan data Rapor Pendidikan sebagai dasar dalam menyusun program peningkatan mutu, sehingga setiap kebijakan dan program sekolah benar-benar berorientasi pada kebutuhan peserta didik serta perbaikan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan.

Ketiga, bagi guru, diperlukan komitmen untuk terus meningkatkan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian melalui berbagai kegiatan pengembangan profesi, seperti pelatihan, komunitas belajar, lokakarya, penelitian tindakan kelas, maupun pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran. Guru juga diharapkan mampu menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, pembelajaran berdiferensiasi, asesmen formatif, serta strategi pembelajaran inovatif yang sesuai dengan karakteristik peserta

didik.

Keempat, bagi sekolah, perlu dilakukan penguatan budaya mutu melalui evaluasi program secara berkala, optimalisasi komunitas belajar guru, peningkatan kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat, serta pengembangan sistem penjaminan mutu internal yang berkelanjutan. Budaya organisasi yang kolaboratif akan memperkuat keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan kondusif.

Kelima, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan melibatkan lebih banyak satuan pendidikan pada jenjang dan karakteristik yang berbeda sehingga hasil penelitian memiliki daya generalisasi yang lebih luas. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan pendekatan mixed methods atau kuantitatif untuk menguji hubungan antara implementasi kebijakan pendidikan, kepemimpinan sekolah, kompetensi guru, budaya organisasi, dan mutu pembelajaran secara lebih komprehensif.

Selain itu, penelitian dapat dikembangkan dengan memanfaatkan data Rapor Pendidikan, hasil asesmen nasional, maupun indikator mutu pendidikan lainnya sehingga mampu memberikan rekomendasi yang lebih kuat bagi pengembangan kebijakan pendidikan di masa mendatang. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, orang tua, masyarakat, dan peneliti, implementasi kebijakan pendidikan diharapkan mampu berlangsung secara lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan sehingga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan mutu pembelajaran serta mendukung terwujudnya pendidikan Indonesia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing.

REFERENSI

- Anderson, J. E. (2011). *Public policymaking: An introduction* (7th ed.). Cengage Learning.
- Bangkara, B. M. A. S., Pattiasina, P. J., Fatmawati, E., Heryani, A., & Damayanto, A. (2022). Relevance of education policy and implementation in Indonesia: A study of the public service literature. *Linguistics and Culture Review*, 6(S5), 156–169. <https://doi.org/10.21744/lingcure.v6nS5.215>

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Darling-Hammond, L. (2017). *Empowered educators: How high-performing systems shape teaching quality around the world*. Jossey-Bass.
- Desimone, L. M., & Sajjadi, M. (2025). How policy features can facilitate teacher learning. *Professional Development in Education*, 51(2), 179–183. <https://doi.org/10.1080/19415257.2025.2473868>
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Fullan, M. (2011). *Change leader: Learning to do what matters most*. Jossey-Bass.
- Fullan, M., Quinn, J., & McEachen, J. (2018). *Deep learning: Engage the world, change the world*. Corwin.
- Hargreaves, A., & Fullan, M. (2012). *Professional capital: Transforming teaching in every school*. Teachers College Press.
- Hattie, J. (2012). *Visible learning for teachers: Maximizing impact on learning*. Routledge.
- Heriyadi, Rahmi, I., Sulistiawan, E., Kusmiran, A. H., & Sulistiyana. (2025). Systematic literature review: Identifikasi gap dan kelemahan implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia periode 2015–2024. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*. <https://doi.org/10.23969/jp.v10i3.28734>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). *Panduan implementasi Kurikulum Merdeka*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025). *Rapor Pendidikan Indonesia Tahun 2025*. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Musthan, Z., Awad, F. B., Rum, J., Kadir, A., Samrin, S., Ahmadi, A., & Zur, S. (2025). Adaptation of educational quality policy: An implementation study of online learning and regional development implications. *Journal of Education and Teaching*, 6(3). <https://doi.org/10.51454/jet.v6i3.710>
- OECD. (2017). *Education policy implementation: A literature review and proposed framework*. OECD Publishing.
- Pont, B., & Maxwell, C. (2026). *Leading for impact: An IIEP-UNESCO framework for education policy implementation*. UNESCO International Institute for Educational Planning.
- Pratama, A. M., Yenti, O., Hawari, K., Basroh, M. A., & Pratiwi, A. (2026). Peran analisis kebijakan pendidikan dalam mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 12(1), 20–32.
- Sabatier, P. A., & Weible, C. M. (Eds.). (2014). *Theories of the policy process* (3rd ed.). Westview Press.
- Slavin, R. E. (2015). *Cooperative learning: Theory, research, and practice* (2nd ed.). Allyn & Bacon.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suriansyah, A., Hadi, S., Putera, A. P., & Aslamiah. (2020). Education in disruption 4.0 era: Development of work culture in elementary schools. *Hamdard Islamicus*, 43(Special Issue), 512–528.
- Viennet, R., & Pont, B. (2017). Education policy implementation: A literature review and proposed framework. *OECD Education Working Papers*, No. 162. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/fc467a64-en>
- Wahyudi, I. (2021). *Kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan*. RajaGrafindo Persada.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.

- Zamroni. (2017). *Manajemen peningkatan mutu sekolah*. Ombak.
- Zulkarnain, D. (2022). *Manajemen mutu pendidikan*. Bumi Aksara.
- Arifin, Z. (2021). *Evaluasi pembelajaran*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2022). *Menjadi guru penggerak Merdeka Belajar*. Bumi Aksara.
- Rusman. (2022). *Model-model pembelajaran*. RajaGrafindo Persada.
- Sanjaya, W. (2021). *Strategi pembelajaran berorientasi standar proses pendidikan*. Kencana.
- Anderson, J. E. (2011). *Public policymaking: An introduction* (7th ed.). Cengage Learning.
- Darling-Hammond, L. (2017). *Empowered educators: How high-performing systems shape teaching quality around the world*. Jossey-Bass.
- Fullan, M. (2011). *Change leader: Learning to do what matters most*. Jossey-Bass.
- Hargreaves, A., & Fullan, M. (2012). *Professional capital: Transforming teaching in every school*. Teachers College Press.
- Hattie, J. (2012). *Visible learning for teachers: Maximizing impact on learning*. Routledge.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.